

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembangunan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat

Pembangunan Masyarakat (Community Development) seperti yang diungkapkan dalam (Akbar et al. , 2023) adalah sebuah pendekatan strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemanfaatan sumber daya lokal, partisipasi aktif, dan pengembangan potensi ekonomi sosial. Dalam penelitian ini, yang mengkaji dampak tingkat pendidikan dan akses pelatihan keterampilan terhadap ketergantungan pada Bantuan Sosial PKH di Desa Jatipamor, pembangunan masyarakat menjadi landasan utama untuk mengevaluasi cara-cara mengurangi ketergantungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan inisiatif bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu keluarga miskin mencapai kemandirian, tetapi seringkali menghasilkan ketergantungan bila tidak diimbangi dengan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut Midgley (1986), pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan partisipasi warga dalam merencanakan dan melaksanakan program untuk mengatasi masalah lokal, dengan tujuan utama untuk membangun kemandirian. Pendekatan ini menekankan pada pergeseran dari ketergantungan pada pihak luar (seperti bantuan sosial) untuk mendorong masyarakat agar dapat berdiri sendiri secara sosial dan memiliki kapasitas yang lebih baik. Di Indonesia, pembangunan masyarakat salah satunya diintegrasikan dalam program-program pemerintah seperti PKH, yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui transfer tunai yang bersyarat.

Program Pembangunan Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama: *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* melibatkan inisiatif dari pemerintah pusat atau daerah yang menerapkan kebijakan secara hierarkis, di mana masyarakat sebagai penerima pasif. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up*

menekankan partisipasi masyarakat dari bawah, di mana komunitas lokal merancang solusi sesuai kebutuhan mereka (Chambers, 1983). Menurut Chambers (1983) dalam bukunya *Rural Development: Putting the Last First*, pendekatan *bottom-up* lebih efektif dalam membangun kemandirian karena menghindari ketergantungan pada bantuan eksternal dan mendorong inovasi lokal. Di Desa Jatipamor, Majalengka, program PKH cenderung bersifat *top-down* melalui distribusi bantuan dari Kementerian Sosial, tetapi dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan elemen *bottom-up* seperti pelatihan keterampilan dan dukungan komunitas.

Secara teori, Pembangunan Masyarakat didefinisikan sebagai *Community Organization and Economic Development*, yang mengintegrasikan organisasi komunitas dengan pengembangan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan berkelanjutan (Christenson & Robinson, 1989). Christenson dan Robinson (1989) dalam *Community Development in Perspective* menjelaskan bahwa PM bukan hanya tentang distribusi sumber daya, melainkan membangun struktur organisasi masyarakat yang kuat untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Dalam penelitian ini, teori ini relevan karena ketergantungan pada PKH dapat dikurangi melalui organisasi komunitas yang memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial, sehingga masyarakat Desa Jatipamor dapat beralih dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi aktif.

Kemandirian masyarakat (*community self-reliance*) adalah inti dari pembangunan masyarakat, di mana komunitas mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada bantuan eksternal jangka panjang. Menurut (Freire, 1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, kemandirian dicapai melalui proses pemberdayaan (*empowerment*) yang melibatkan kesadaran kritis dan aksi kolektif. Freire menekankan bahwa ketergantungan sering kali disebabkan oleh struktur sosial yang menindas, dan pembangunan masyarakat harus membebaskan individu dari siklus kemiskinan melalui pendidikan dan partisipasi. Dalam konteks PKH, kemandirian diukur dari kemampuan keluarga untuk menghasilkan pendapatan alternatif, dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan dan eksternal seperti dukungan komunitas (Peraturan Menteri Sosial RI No. 4 Tahun 2017 tentang PKH).

Studi dalam *Development as Freedom* menambahkan bahwa kemandirian bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga kemampuan untuk membuat pilihan bebas, yang dapat terhambat oleh rendahnya pendidikan dan akses pelatihan (Sen, 1999). Di Indonesia, penelitian oleh (Statistik, 2020) menunjukkan bahwa 40% penerima PKH di pedesaan masih bergantung pada bantuan setelah 5 tahun, menandakan kegagalan dalam membangun kemandirian jika faktor pendukung tidak dioptimalkan.

2.1.2 Ketergantungan Bantuan Sosial

2.1.2.1 Pengertian Ketergantungan

Menurut Amartya Sen, ekonomi pembangunan yang meraih Nobel pada 1998, ketergantungan didefinisikan sebagai kurangnya "kebebasan" individu untuk mencapai kesejahteraan tanpa bantuan eksternal, di mana faktor seperti pendidikan rendah membatasi "kapabilitas" atau kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Dalam konteks bantuan sosial, ketergantungan ini dianggap sebagai indikator kegagalan sistem sosial dan ekonomi untuk memberdayakan orang miskin, sehingga mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Sen menekankan bahwa pendidikan dan akses ke sumber daya adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan ini, karena tanpa kebebasan tersebut, individu tidak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Sen, A., 1999).

James Heckman, ahli ekonomi pendidikan yang meraih Nobel pada 2000, memandang ketergantungan sebagai hasil dari "defisit investasi manusia" atau *human capital deficit*, di mana kurangnya pendidikan atau keterampilan membuat individu bergantung pada bantuan jangka panjang untuk bertahan hidup. Ia menjelaskan bahwa ini menciptakan siklus kronis di mana pengangguran diperkuat oleh pendidikan rendah, sehingga program bantuan sosial seperti PKH diperlukan sebagai jembatan sementara, namun harus disertai investasi dalam pendidikan awal untuk memutus rantai ketergantungan. Heckman menggunakan data empiris untuk

menunjukkan bahwa defisit keterampilan ini tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial, mempengaruhi generasi mendatang (Heckman, J. J., 2006).

2.1.2.2 Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Ketergantungan pada bantuan sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi individu maupun lingkungan sosial. Menurut Todaro & Smith (2011) faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap lapangan kerja, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, menurut Mubyarto (2002), ketergantungan juga dapat muncul akibat kurangnya pemberdayaan dan kesempatan untuk mandiri, sehingga penerima bantuan cenderung bergantung pada bantuan tersebut dalam jangka panjang.

Menurut Robert M. Solow (1990), bantuan sosial harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menciptakan ketergantungan, melainkan sebagai stimulus untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penerima.

2.1.2.3 Konsep Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Konsep ketergantungan pada bantuan sosial merujuk pada individu atau kelompok penerima bantuan yang menjadi bergantung pada bantuan tersebut sehingga berkurangnya motivasi dan kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi maupun sosial. Ketergantungan dapat menimbulkan dampak negative jangka Panjang, seperti menurunnya inisiatif mencari pekerjaan, mengembangkan keterampilan, atau berusaha dari kemiskinan secara mandiri.

Ketergantungan pada bantuan sosial terjadi Ketika bantuan yang diberikan tidak diimbangi dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penerima, sehingga mereka cenderung mengandalkan bantuan tersebut sebagai sumber utama kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus karena penerima bantuan tidak terdorong untuk meningkatkan produktivitas atau mencari alternatif penghasilan yang lain (Todaro & Smith, 2011).

Dalam konteks Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, konsep ketergantungan juga menjadi perhatian penting dalam perancangan program bantuan sosial. UU tersebut menekankan bantuan sosial harus diarahkan

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan Masyarakat supaya mampu mandiri dan berpartisipasi aktif dalam Pembangunan sosial dan ekonomi.

2.1.2.4 Indikator Ketergantungan Bantuan Sosial

Menurut Soetomo (2014), bantuan sosial yang diberikan secara terus-menerus tanpa pemberdayaan dapat menimbulkan ketergantungan sosial masyarakat. Indikator:

- a. Mengharapkan bantuan rutin dari pemerintah
- b. Kurangnya inisiatif keluar dari status penerima bantuan
- c. Menganggap bantuan sebagai hak tetap

2.1.2.5 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi yang diberikan oleh pemerintah atau Lembaga sosial kepada individu tau kelompok Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2009) bantuan sosial adalah segala bentuk pemberian yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat yang kurang mampu, baik berupa uang, barang, atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka agar hidup layak. Bantuan ini bersifat tidak mengharapkan imbalan langsung dari penerima, sehingga termasuk dalam kategori bantuan sosial yang bersifat subsidi atau hibah.

Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban Masyarakat yang mengalami kemiskinan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan sosial ini dapat berupa bantuan langsung seperti uang tunai, sembako, atau bantuan tidak langsung seperti pelatihan keterampilan dan akses layanan Kesehatan (Hakim et al., 2024).

Dalam kerangka legislatif Indonesia, program bantuan sosial diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menetapkan bahwa bantuan sosial mencakup penyediaan bantuan uang, produk, atau layanan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, bantuan sosial adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan, yang bertujuan untuk melindungi mereka dari kemungkinan bahaya sosial.

2.1.2.6 Tujuan dan Fungsi Bantuan Sosial

Tujuan utama dari program bantuan sosial adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, mengatasi ketidakadilan sosial, dan memberikan perlindungan bagi individu yang menghadapi masalah ekonomi dan sosial berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009. Program ini dirancang untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Soekanto, 2009, hal. 210–240).

Peran bantuan sosial tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berdiri sendiri dan bersikap produktif dalam jangka panjang. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mencegah ketidakadilan sosial. Menurut Slamet (2010), bantuan sosial berfungsi sebagai cara untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan dan sebagai bentuk perlindungan agar mereka dapat bertahan dalam keadaan krisis atau kesulitan. Selain itu, bantuan sosial juga berperan penting dalam memperkuat rasa solidaritas di masyarakat dan meningkatkan perasaan keadilan di antara warganya.

2.1.3 Tingkat Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan dasar, serta nilai-nilai yang mendukung partisipasinya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi modal manusia karena dapat meningkatkan kapasitas,

produktivitas, daya saing, dan kesiapan individu dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja (Sari et al., 2025; Sofiani et al., 2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi tersebut meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang telah diselesaikan dapat menggambarkan pengalaman belajar formal dan kapasitas dasar yang dimiliki seseorang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berkaitan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi individu dalam pasar kerja, meskipun manfaatnya tetap dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kesempatan kerja (Gracia, 2025).

Dalam penelitian ini, pendidikan difokuskan pada tingkat pendidikan formal responden, yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan kemampuan, mengakses informasi, serta memasuki kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Namun, pendidikan formal tidak secara otomatis menjamin pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik karena hasilnya turut dipengaruhi oleh kesesuaian keterampilan, kondisi pasar kerja, dan dukungan ekonomi lainnya (Nurisman, 2025).

2.1.3.2 Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan seseorang melalui lembaga pendidikan resmi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi landasan bagi pendidikan berikutnya. Pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Adapun pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, serta pendidikan profesi dan spesialis.

Tingkat pendidikan formal dapat memberikan gambaran mengenai lama dan jenjang pengalaman belajar yang telah ditempuh oleh seseorang. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh informasi, mengembangkan kemampuan berpikir, dan mengakses pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu.

Namun, tingkat pendidikan formal tidak secara otomatis menjamin seseorang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang memadai. Pengaruh pendidikan terhadap kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan lapangan kerja, pengalaman kerja, keterampilan praktis, kondisi wilayah, usia, serta kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan.

2.1.3.3 Indikator Tingkat Pendidikan

Indikator tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal diukur berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh responden.

Kategori tingkat pendidikan formal dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sekolah Dasar atau sederajat;
- b. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- c. Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- d. Diploma III;
- e. Perguruan tinggi.

Data tingkat pendidikan diperoleh melalui pertanyaan faktual mengenai pendidikan formal terakhir yang telah diselesaikan oleh responden. Dengan demikian, variabel tingkat pendidikan tidak diukur menggunakan pernyataan sikap dengan skala Likert, tetapi menggunakan data jenjang pendidikan formal.

2.1.3.4 Teori Modal Manusia dalam Pendidikan

Teori Modal Manusia atau *Human Capital Theory* yang dikembangkan oleh Becker (1964) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, produktivitas, dan kapasitas individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Menurut teori tersebut, individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menerima informasi, menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan memenuhi persyaratan pekerjaan. Pendidikan juga dapat memperluas pilihan pekerjaan dan meningkatkan peluang memperoleh pendapatan.

Dalam konteks keluarga penerima Program Keluarga Harapan, tingkat pendidikan formal dapat berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengakses informasi, memahami peluang kerja, mengelola sumber daya rumah tangga, dan mencari alternatif sumber pendapatan. Pendidikan formal yang lebih tinggi diperkirakan dapat memperkuat kapasitas individu untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Meskipun demikian, pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemandirian keluarga penerima bantuan sosial. Manfaat pendidikan dapat dipengaruhi oleh tersedianya lapangan kerja, kondisi ekonomi daerah, keterampilan yang dimiliki, modal usaha, jaringan sosial, dan akses terhadap program pemberdayaan. Oleh karena itu, pendidikan formal perlu didukung oleh pelatihan keterampilan dan kesempatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.3.5 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Ketergantungan Bantuan Sosial

Tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan, mengakses informasi, dan mengembangkan sumber penghasilan. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pilihan pekerjaan yang lebih terbatas, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu.

Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan individu lebih banyak bekerja pada sektor informal, pekerjaan tidak tetap, atau pekerjaan dengan pendapatan relatif rendah. Kondisi pendapatan yang tidak stabil dapat meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga dan menyebabkan bantuan sosial menjadi salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, memahami informasi ekonomi, serta memanfaatkan peluang usaha. Kemampuan tersebut berpotensi membantu keluarga meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Berdasarkan Teori Modal Manusia Becker (1964), pendidikan dapat meningkatkan kapasitas produktif seseorang. Oleh karena itu, tingkat pendidikan formal diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan bantuan sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan responden, semakin besar kemungkinan responden memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber pendapatan di luar bantuan sosial.

Namun, hubungan tersebut tidak bersifat mutlak. Tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu langsung mengurangi ketergantungan apabila tidak tersedia lapangan kerja, modal usaha, akses pelatihan, dan peluang ekonomi yang memadai. Dengan demikian, pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketergantungan bantuan sosial perlu diuji secara empiris bersama dengan akses pelatihan keterampilan.

2.1.4 Akses Pelatihan Keterampilan

2.1.4.1 Pengertian Pelatihan

Pelatihan adalah prosedur metodis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap individu agar mereka dapat melaksanakan aktivitas atau profesi dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan tidak hanya berfokus pada memperoleh keterampilan teknis tetapi juga pada membudayakan perilaku produktif dan kebiasaan kerja. Dalam konteks sosial dan ekonomi, pelatihan berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan sumber daya manusia, memungkinkan orang untuk mencapai lebih banyak kemandirian dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas manusia dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal seperti program bantuan sosial.

Menurut Hasibuan (2011), Pelatihan adalah prosedur pendidikan singkat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sukses dan efisien. Dia menyatakan bahwa pelatihan adalah mekanisme penting dalam pengembangan sumber daya manusia, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga mendorong moral dan etika kerja. Hasibuan menegaskan bahwa pelatihan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membentuk tenaga kerja yang produktif dan sangat kompetitif.

2.1.4.2 Tujuan Pelatihan

Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan bakat, keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu guna meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Pelatihan bertujuan membentuk individu yang produktif, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja maupun sosial. Dalam konteks sosial seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, mengubah pola pikir ketergantungan menjadi produktivitas, serta mendorong peserta agar mampu mengembangkan usaha atau keterampilan hidup secara berkelanjutan.

Menurut Simamora (2006), pelatihan memiliki tujuan utama untuk membantu karyawan atau individu memperoleh keahlian dan kemampuan baru yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. Ia menyebut bahwa pelatihan dirancang untuk memperbaiki kekurangan dalam kinerja dan membantu peserta mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Selain itu, pelatihan juga bertujuan membentuk perilaku kerja yang positif, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat budaya kerja yang produktif.

2.1.4.3 Indikator Akses Pelatihan Keterampilan

Menurut Noe R A. (2017), indikator pelatihan mencakup beberapa elemen penting, yaitu:

- a. Kemudahan mengikuti pelatihan
- b. Kebutuhan Pelatihan

2.1.4.4 Akses pelatihan keterampilan

Teori *Human Capital* (Becker, 1964) juga menjelaskan pengaruh akses pelatihan keterampilan sebagai bentuk investasi non-formal yang lebih cepat menghasilkan pengembalian ekonomi dibandingkan pendidikan formal. Becker menyatakan bahwa pelatihan vokasi atau kewirausahaan meningkatkan employability (kemampuan kerja) dengan memberikan keterampilan spesifik yang relevan dengan pasar kerja lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial seperti PKH. Dalam PKH, akses pelatihan (misalnya, program dari Dinas Tenaga Kerja atau PKK desa) memengaruhi ketergantungan dengan memenuhi syarat pendampingan, di mana penerima diajarkan keterampilan seperti pertanian modern atau kerajinan, yang pada gilirannya mengurangi frekuensi penerimaan bantuan jangka panjang.

Pendekatan ini didukung oleh teori Andragogy dari (Knowles, 1980), yang menekankan bahwa pendidikan orang dewasa (seperti pelatihan keterampilan) efektif dalam membangun kemandirian karena berbasis pada pengalaman peserta dan kebutuhan praktis. Knowles berargumen bahwa akses pelatihan yang mudah (berdasarkan jarak, biaya, dan informasi) mendorong motivasi intrinsik untuk

mandiri, mengurangi ketergantungan dengan menciptakan sumber pendapatan alternatif. Laporan ILO (2019) tentang program pelatihan di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi dalam pelatihan mengurangi ketergantungan PKH hingga 30% di daerah pedesaan seperti Majalengka, karena meningkatkan kewirausahaan dan mengurangi isolasi ekonomi. Di Desa Jatipamor, akses pelatihan yang terbatas dapat memperburuk ketergantungan, sementara akses yang baik dapat mengubah penerima PKH menjadi pelaku usaha mandiri.

2.1.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.1.5.1 Pengertian Program

Desain atau program memiliki relevansi dengan hasil yang Ingin dicapai. Sebuah program biasanya terdiri dari semua kegiatan di bawah satu unit administrative, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan memperhitungkan lemen-elemen pendukung seperti waktu dan uang (Hayati, 2012, p. 11). Petunjuk pelaksanaan program juga mencakup pertanyaan atau Kesimpulan dari berbagai harapan dan tujuan yang harus dilakukan secara bersamaaan dan teratur untuk mencapai tujuan yang sama. (Arikunto, 2016, p. 2)

Pengertian program dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, program merupakan suatu rencana yang berisi serangkaian kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan pada waktu tertentu di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai aktivitas agar berjalan secara terarah dan sistematis. Sementara itu, dalam pengertian khusus, program dipahami sebagai suatu kesatuan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Pelaksanaan program melibatkan sejumlah individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai aktivitas yang saling berkaitan. Oleh karena itu, program tidak hanya berupa satu kegiatan tunggal, melainkan terdiri atas beberapa kegiatan yang terintegrasi dan membentuk suatu sistem yang terorganisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam jangka

waktu yang relatif panjang serta memiliki hubungan yang saling mendukung untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan.

2.1.5.2 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam (Yasin, 2021) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengatasi kemiskinan. Program ini bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan yang terjadi antar generasi dengan meningkatkan akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Target utama PKH adalah rumah tangga yang tergolong miskin dengan kriteria tertentu, yaitu yang memiliki ibu hamil atau menyusui, anak-anak prasekolah, anak-anak sekolah, lansia, dan individu dengan disabilitas berat. Dengan memberikan bantuan tunai yang disertai kewajiban untuk memenuhi syarat tertentu, PKH diharapkan dapat merangsang perubahan dalam perilaku sosial ekonomi keluarga penerima agar dapat lebih mandiri di masa mendatang.

Dasar hukum untuk PKH diatur oleh Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Program Keluarga Harapan, dan lebih lanjut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan perundang-undangan ini menegaskan bahwa bantuan sosial adalah instrumen pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi populasi yang miskin dan rentan. Akibatnya, PKH bukan hanya bantuan keuangan, tetapi juga merupakan komponen integral dari rencana pembangunan sosial nasional yang komprehensif.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2018) menjelaskan bahwa PKH adalah inisiatif transfer tunai bersyarat untuk rumah tangga miskin yang diidentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Dukungan ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan akses ke layanan sosial dasar. Ini menunjukkan bahwa penerima tidak hanya mendapatkan bantuan keuangan tetapi juga termotivasi untuk lebih aktif terlibat dalam memastikan pendidikan anak-anak dan perawatan kesehatan keluarga.

PKH adalah adaptasi dari konsep transfer tunai bersyarat yang telah dilaksanakan secara efektif di beberapa negara berkembang, termasuk program Bolsa Familia di Brasil dan program Progresa di Meksiko. Menurutnya, keberhasilan PKH sangat bergantung pada sinergi antar sektor, terutama pendidikan dan kesehatan, serta keberlanjutan pendanaan dari pemerintah (Suharto, 2015, p. 255).

Dari sisi sosiologi, menekankan bahwa PKH berfungsi tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Dengan syarat yang melekat, program ini diharapkan dapat mengurangi budaya ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika pengawasan lemah, PKH justru bisa menimbulkan ketergantungan jangka Panjang (Soetomo, 2013, p. 110).

PKH juga memiliki dimensi gender yang penting. Sebagaimana dinyatakan oleh dalam evaluasi PKH, pemberian bantuan yang lebih sering ditujukan kepada ibu dalam keluarga bertujuan untuk memastikan alokasi dana digunakan secara optimal bagi kepentingan anak dan kebutuhan rumah tangga (Hastuti, 2018, p. 35). Hal ini sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana untuk kesejahteraan keluarga.

Secara lebih luas, PKH dipandang sebagai salah satu instrumen pembangunan sosial yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan 1 (penghapusan kemiskinan), tujuan 3 (kesehatan yang baik), dan tujuan 4 (pendidikan berkualitas). Dengan mendorong keluarga miskin untuk mengakses layanan dasar, PKH menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

2.1.5.3 Tujuan Program Keluarga Harapan

Dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan, tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga yang menerima bantuan lewat akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
- b. Mengurangi beban biaya serta menambah pendapatan bagi keluarga yang kurang mampu dan miskin.
- c. Mendorong perubahan sikap dan kemandirian bagi keluarga yang menerima bantuan dalam memperoleh akses layanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan sosial.
- d. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.
- e. Memperkenalkan keuntungan dari produk dan layanan resmi kepada keluarga yang menerima manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) terutama bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH, sebagai program transfer tunai bersyarat (CCT), menawarkan bantuan dengan syarat tertentu, termasuk kehadiran anak-anak di sekolah dan penggunaan fasilitas kesehatan. Ini sejalan dengan Peraturan No. 1 Tahun 2018 dari Menteri Sosial Republik Indonesia tentang PKH, yang menegaskan bahwa tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kemensos, 2018).

Tujuan PKH tidak hanya sebatas mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, melainkan juga mendorong perubahan perilaku sosial agar lebih memprioritaskan pendidikan dan kesehatan anak. Suharto menekankan bahwa PKH harus dipahami sebagai strategi *pemberdayaan masyarakat*, bukan sekadar bantuan karitatif. Dengan demikian, PKH diharapkan melahirkan kemandirian jangka Panjang (Suharto, 2015, p. 260).

Dari sisi hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi landasan penting PKH. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, melindungi dari risiko sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. PKH sebagai implementasi dari undang-undang tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Dari *SM ERU Research Institute*, tujuan PKH juga terkait erat dengan *dimensi gender*. Penyaluran bantuan kepada ibu dalam keluarga dipandang lebih efektif dalam memastikan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan anak, seperti pendidikan, gizi, dan Kesehatan (Hastuti, 2018, p. 37). Hal ini sejalan dengan bukti empiris internasional bahwa perempuan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana rumah tangga.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Menurut Hermawati, Kusnali & Witono (2024) menyoroti bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap PKH dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah tangga, dukungan komunitas, dan efektivitas program pemberdayaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa penerima bantuan yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat cenderung lebih cepat keluar dari ketergantungan dibandingkan yang pasif.

Haliim & Hakim (2024) mengungkapkan bahwa faktor struktural dan kultural seperti kebijakan pemerintah yang kurang adaptif, lemahnya edukasi kemandirian, serta rendahnya dukungan sosial menjadi penyebab utama munculnya ketergantungan terhadap PKH. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis pemberdayaan agar program PKH tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang juga peneliti ingin analisis pengaruh dukungan komunitas terhadap tingkat ketergantungan, namun penelitian peneliti lebih luas karena menggabungkan aspek akses keterampilan dan pendidikan sebagai variabel tambahan.

Iskamy, S.N. (2023) mengkaji bagaimana rumah tangga penerima PKH di Desa Krampon menunjukkan perilaku ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Fokus utamanya adalah melihat mengapa bantuan yang seharusnya menjadi stimulus sementara justru diperlakukan sebagai sumber pendapatan utama. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar keluarga penerima memandang PKH sebagai bagian tetap dari pendapatan bulanan sehingga penggunaan dana lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, bukan investasi produktif. Selain itu, persepsi penerima bahwa bantuan akan terus diberikan tanpa batas waktu

menciptakan pola pikir pasif, di mana keluarga tidak terdorong mencari alternatif peningkatan ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti rendahnya literasi keuangan, minimnya keterampilan kerja, serta terbatasnya lapangan pekerjaan lokal sebagai elemen yang memperkuat ketergantungan. Peran pendamping PKH dinilai belum optimal dalam memberikan edukasi terkait kemandirian dan pemanfaatan dana secara produktif, sehingga proses graduasi mandiri menjadi sangat lambat.

Rahmi, N. (2023) dalam penelitiannya menilai dua aspek penting dari Program Keluarga Harapan (PKH): peningkatan kesejahteraan dan munculnya pola ketergantungan di kalangan keluarga miskin di Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PKH berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, kesehatan, dan konsumsi rumah tangga. Dana bantuan membuat beban pengeluaran sedikit berkurang sehingga rumah tangga merasa lebih stabil secara ekonomi dalam jangka pendek. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya pola ketergantungan, terutama ketika bantuan dipandang sebagai pendapatan rutin yang selalu tersedia. Banyak rumah tangga menerapkan perilaku konsumtif dan tidak mengalokasikan dana untuk aktivitas produktif, yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak sepenuhnya dibarengi dengan peningkatan kemandirian.

Rukmana, B.I. (2022) dalam penelitiannya menganalisis bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) mempengaruhi tingkat ketergantungan keluarga penerima di Kecamatan Lape, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun perilaku konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima PKH di Kecamatan Lape mengalami peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan namun pada saat yang sama muncul kecenderungan ketergantungan yang cukup kuat. Banyak keluarga menganggap PKH sebagai sumber pendapatan tetap yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan harian. Hal ini menyebabkan motivasi untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri menjadi rendah. Dana PKH lebih sering digunakan

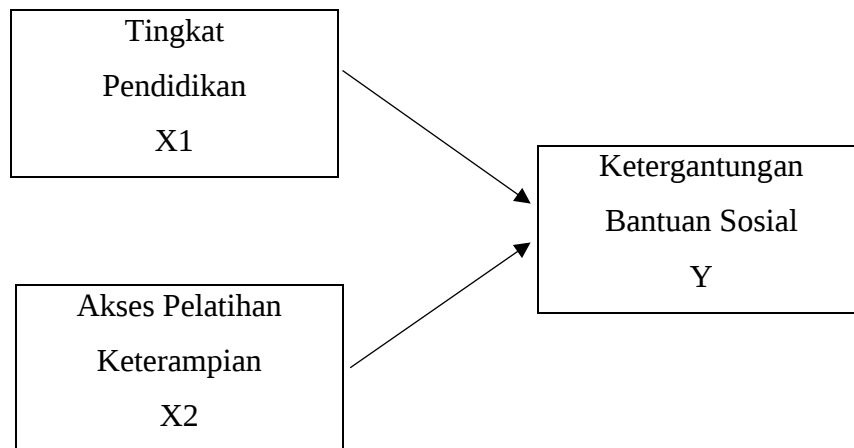
untuk konsumsi rutin dan jarang diarahkan pada aktivitas produktif, sehingga keluarga tidak mengalami peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Pemilihan variabel pendidikan, akses pelatihan keterampilan, dan dukungan komunitas sebagai faktor yang diduga memengaruhi tingkat ketergantungan pada bantuan sosial didasarkan pada sintesis hasil penelitian terdahulu yang kredibel. Hermawati, Kusnali, dan Witono (2024) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap PKH dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah tangga, dukungan komunitas, serta efektivitas program pemberdayaan sosial, di mana penerima yang aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi cenderung lebih cepat keluar dari ketergantungan. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan komunitas sebagai modal sosial yang mendorong kemandirian. Haliim dan Hakim (2024) mengidentifikasi bahwa lemahnya edukasi kemandirian dan rendahnya dukungan sosial menjadi penyebab struktural dan kultural munculnya ketergantungan terhadap PKH, sehingga menguatkan urgensi variabel pendidikan dan dukungan komunitas. Iskamy (2023) dan Rahmi (2023) menemukan bahwa ketergantungan penerima PKH diperkuat oleh rendahnya literasi, minimnya keterampilan kerja, serta perilaku konsumtif rumah tangga, yang menunjukkan perlunya akses pelatihan keterampilan untuk mengarahkan bantuan ke aktivitas produktif. Rukmana (2022) juga mencatat bahwa keluarga penerima PKH di Kecamatan Lape cenderung menjadikan bantuan sebagai sumber pendapatan tetap dan kurang termotivasi meningkatkan pendapatan mandiri, yang kembali mengindikasikan peran penting pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan komunitas dalam mengurangi ketergantungan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, ketiga variabel tersebut dipandang paling relevan dan empiris untuk dianalisis sebagai determinan tingkat ketergantungan keluarga penerima bantuan sosial PKH di Desa Jatipamor..3

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran sistematis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah ketergantungan pada bantuan sosial, sedangkan variabel independennya adalah Tingkat pendidikan dan akses pelatihan keterampilan tersebut, yaitu:

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketergantungan bantuan sosial pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

H₀₁: Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketergantungan bantuan sosial pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

H₂: Akses pelatihan keterampilan berpengaruh terhadap ketergantungan bantuan sosial pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

H₀₂: Akses pelatihan keterampilan tidak berpengaruh terhadap ketergantungan bantuan sosial pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

H₃: Tingkat pendidikan dan akses pelatihan keterampilan secara simultan berpengaruh terhadap ketergantungan bantuan sosial pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

H₀₃: Tingkat pendidikan dan akses pelatihan keterampilan secara simultan tidak berpengaruh terhadap ketergantungan bantuan sosial pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.